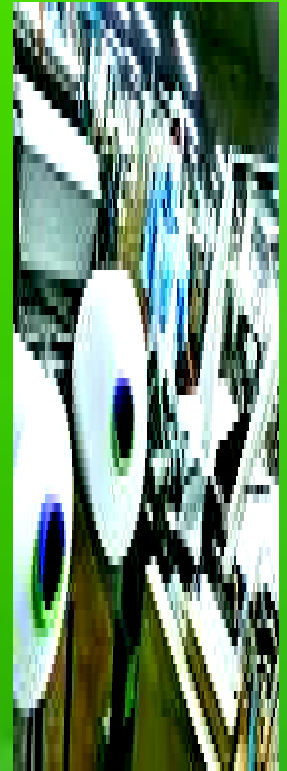




Katalog BPS : 9302003.3217

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BANDUNG BARAT MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BANDUNG BARAT
MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 2013**

<http://bandungbaratkab.bps.go.id>



**Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bandung Barat**

*Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Bandung Barat
Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013*

Nomor Publikasi : 3217.1401
Katalog BPS : 9302003.3217

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : 83

Naskah :
Seksi Statistik Neraca Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Desain gambar kulit :
Seksi Statistik Neraca Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, publikasi **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013** ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Publikasi ini dapat memberikan gambaran mengenai potensi ekonomi makro yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara luas, interpretasi kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan kualitas hidup, distribusi pendapatan yang merata, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan aktivitas sektoral perekonomian.

Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat hingga tahun 2013 tentunya harus dilaksanakan, sehingga pembangunan selanjutnya dapat berjalan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 diharapkan mampu menjawab kebutuhan informasi tersebut. Data yang digunakan untuk menyusun publikasi bersumber dari Dinas, Badan dan Lembaga di tingkat Kabupaten Bandung Barat dan survei-survei yang dilaksanakan BPS Kabupaten Bandung Barat,

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan dijadikan rujukan dalam penentuan kebijakan pembangunan selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung Barat, September 2014
**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bandung Barat**

Dra. Hj. Lilis Pujiawati
Nip. : 19610814 199003 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan	4
	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5
	2. Struktur Perekonomian	5
	3. PDRB Perkapita	5
	4. Tingkat Inflasi	5
	1.3. Manfaat Pendapatan Regional	6
	1.4. Pergeseran tahun Dasar	7
BAB II	METODOLOGI	
	2.1. Konsep dan Definisi	10
	2.1.1. PDRB Atas Dasar Harga Pasar	10
	2.1.2. Pendekatan Produksi	11
	2.1.3. Pendekatan Pendapatan	11
	2.1.4. Pendekatan Pengeluaran	11
	2.1.5. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar	11
	2.1.6. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor	12
	2.1.7. Pendapatan Regional	12
	2.1.8. Pendapatan Per Kapita	13
	2.1.9. Produk Domestik dan Produk Regional	14
	2.1.10. Pendapatan Regional Atas Dasar Berlaku dan Harga Konstan	15
	2.2. Metode Penghitungan Pendapatan Regional	16
	2.2.1. Metode Langsung	16
	2.2.2. Metode Tidak Langsung	18
	2.3. Penyajian Angka Indeks	18
	2.3.1. Indeks Perkembangan	19
	2.3.2. Indeks Berantai	20
	2.3.3. Indeks Implisit	21
	2.4. Perkiraan Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Konstan	21
	2.4.1. Revaluasi	22

	2.4.2. Ekstrapolasi	22
	2.4.3. Deflasi	23
	2.4.4. Deflasi Berganda (<i>Double Deflation</i>)	23
BAB III	URAIAN SEKTORAL	25
	3.1. Pertanian	27
	3.1.1. Tanaman Bahan Makanan	27
	3.1.2. Tanaman Perkebunan	28
	3.1.3. Kehutanan	29
	3.1.4. Peternakan dan Hasil-hasilnya	29
	3.1.5. Perikanan	30
	3.1. Pertambangan dan Penggalian	31
	3.2. Industri Pengolahan	32
	3.3. Listrik, Gas dan Air Bersih	34
	3.4. Bangunan dan Konstruksi	35
	3.5. Perdagangan, Hotel dan Restoran	36
	3.6. Pengangkutan dan Komunikasi	38
	3.7. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	41
	3.8. Jasa - jasa	44
BAB IV	KINERJA PEREKONOMIAN KABUPATEN BANDUNG BARAT	
	4.1. Produk Domestik Regional Bruto	48
	4.2. Struktur Ekonomi	52
	4.3. Pertumbuhan Ekonomi	56
	4.4. Pendapatan Perkapita	61
	4.5. Tingkat Inflasi	63

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 - 2013.....	48
Tabel 4.2.	PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011- 2013.....	50
Tabel 4.3.	PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011- 2013.....	51
Tabel 4.4.	Distribusi PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 - 2013.....	54
Tabel 4.5.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011- 2013.....	58
Tabel 4.6.	PDRB Per Kapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 - 2013.....	61

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1.	Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013...	55
Tabel 4.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011- 2013.....	57
Tabel 4.3.	PDRB Per Kapita Per Tahun Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 - 2013.....	62

<http://bandungbaratkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2013	67
2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2013	68
3.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2013	69
4.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2013	70
5.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2013	71
6.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2013	72
7.	Indeks Implisit PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2013	73
8.	Inflasi PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2013	74
9.	Angka Agregatif PDRB, Jumlah Pertengahan Tahun Dan PDRB Per kapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 – 2013	75

BAB I
PENDAHULUAN

<http://bandungbaratkabps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh beberapa faktor ekonomi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan keahlian atau kewirausahaan. Selain itu pembangunan ekonomi suatu wilayah tak luput dari pengaruh dari sosial budaya, keadaan politik, kelembagaan dan sistem yang berlaku. Faktor-faktor tersebut saling terkait dalam menggerakkan roda perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan yang tak kalah penting adalah unsur pemerataan pembangunan yang mendorong terjadinya pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Salah satu aspek penting dalam kegiatan perekonomian adalah terciptanya kondisi makroekonomi yang kuat dengan terkendalinya stabilitas ekonomi, inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/regional.

Terjaganya indikator makroekonomi pada tingkatan yang stabil menjadi tolak ukur awal dalam menciptakan pembangunan ekonomi

yang berkelanjutan. Satu hal yang penting, stabilitas ekonomi bukan hanya difokuskan pada pertumbuhan semata, tetapi terciptanya pemerataan dan efek domino hingga kesektor riil dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tersebut. Perumusan strategi dan kebijakan yang tepat dalam pemerataan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang akan menciptakan pemerataan pada motor pertumbuhan ekonomi nasional dan regional, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Bandung Barat.

Pada tahun tahun 2013 secara nasional, di tengah arus krisis ekonomi global yang disebabkan oleh krisis Eropa dan resesi ekonomi di Amerika Serikat, Indonesia dalam beberapa kuartal terakhir masih mampu mempertahankan pertumbuhannya di atas 6%. Pada tahun ini adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM), setidaknya berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Kenaikan biaya transportasi yang juga berimbas terhadap kenaikan komoditi bahan pokok, menyebabkan konsumsi rumah tangga melambat. Pertumbuhan ekonomi negeri ini secara umum masih didominasi oleh konsumsi domestik, sehingga pengaruh kenaikan inflasi secara tidak langsung mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut juga berimbas pada kondisi perekonomian kabupaten Bandung Barat dimana pada tahun ini masih mampu meningkatkan kinerja perekonomian hingga 5,94 persen. Meskipun mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Bandung Barat menunjukkan eksistensinya terhadap gejolak perekonomian secara makro dengan

pertumbuhan yang positif. Meski diakui bahwa masih banyak permasalahan perekonomian yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Masalah pemerataan ekonomi, pengangguran, investasi, infrastruktur dan sistem birokrasi menjadi prioritas penyelesaian dalam pembangunan perekonomian.

Pemerintah dengan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan; mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha. Selain itu untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan mengoptimalkan potensi dan kapasitas perekonomian diharapkan pembangunan mampu menyerap sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah yang tinggi sehingga terwujud kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Pembangunan harus lebih ditingkatkan secara bersamaan antara pertumbuhan dengan pemerataan ekonomi, sehingga akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat agar dapat memenuhi segala kebutuhannya.

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat, maka dibuat indikator makro yang biasa digunakan sebagai penilaian kinerja perekonomian. Indikator makro tersebut diantaranya adalah **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**. PDRB ini dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tertentu dan juga dapat menggambarkan struktur ekonominya.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha tahun 2013 adalah untuk memperoleh gambaran perkembangan pembangunan secara makro. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan bahan pijakan dalam menetapkan kebijakan dan perencanaan pembangunan ke depan. Indikator PDRB dapat pula digunakan untuk menyimpulkan tingkat kesejahteraan (*Social Welfare*).

Dari angka PDRB dapat diturunkan beberapa indikator ekonomi yang digunakan sebagai alat ukur dalam menilai perkembangan ekonomi. Indikator yang dihasilkan dari angka PDRB antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi,
2. Struktur Perekonomian,
3. PDRB per Kapita, dan
4. Tingkat Inflasi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Besaran PDRB disajikan dalam bentuk deret waktu sehingga mengikuti perkembangan data PDRB dari tahun ke tahun. Gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan angka PDRB atas dasar harga konstan pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Nilai pertumbuhan riil dapat dilihat baik dari angka total PDRB maupun masing-masing sektornya.

2. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari data PDRB. Peranan atau kontribusi setiap sektor terhadap nilai PDRB dapat dilihat secara keseluruhan. Gambaran tentang perekonomian suatu daerah berguna bagi para ahli yang bergerak di bidang perencanaan dan pengambilan keputusan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang baik pemerintah maupun swasta.

3. PDRB Per Kapita

Pertumbuhan yang cukup tinggi belum tentu menjamin tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi masyarakat suatu daerah jika pertumbuhan penduduknya melebihi tingkat pertumbuhan ekonominya.

Ditinjau dari segi ekonomi, PDRB perkapita dapat dipakai untuk menunjukkan perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah. Dilihat dari segi konsumsi, artinya penduduk yang tinggal di wilayah tersebut akan mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih banyak. Tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dengan cara membandingkan dengan daerah lainnya.

4. Tingkat Inflasi

Indeks harga implisit menggambarkan tingkat perkembangan harga atau secara makro. Indeks harga implisit diperoleh dengan cara

membagi nilai NTB atas dasar harga berlaku dengan NTB atas harga konstan pada tahun yang sama dikalikan 100.

1.3. Manfaat Pendapatan Regional

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah/wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.
2. PDRN harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi dalam suatu daerah/wilayah. Sektor-sektor yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah/wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan bagaimana produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/wilayah regional.

5. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan dari sektor ekonomi.
6. PDRB penggunaan atas harga konstan bermanfaat untuk pengukuran laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri/wilayah regional.
7. PDRB dan PDRN per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PDRN per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB dan PDRN per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

1.4. Pergeseran Tahun Dasar

Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bandung Barat tahun 2012 merupakan penerbitan rutin seperti tahun-tahun sebelumnya. PDRB Kabupaten Bandung Barat tahun 2012 ini merupakan publikasi keempat yang menggunakan tahun dasar 2000.

Pada umumnya struktur ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun akan mengalami perubahan. Hal ini terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Mengantisipasi hal itu, perlu dilakukan perubahan tahun dasar agar masih relevan dengan struktur ekonomi pada rentang waktu tersebut.

Pergeseran tahun dasar pada PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 1993 ke tahun 2000 dilandasi oleh alasan pokok sebagai berikut:

1. Rekomendasi UN bahwa sebaiknya tahun dasar dirubah dengan tahun yang berakhiran 0 atau 5.
2. Seri tahun dasar 1993 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi yang terjadi, dan sudah dianggap terlalu lama.
3. Merupakan kesepakatan bersama yang dideklarasikan oleh negara-negara di wilayah Asia Pasifik (UN-ESCAP), agar hasil pengukuran PDB yang diperoleh dapat dibandingkan secara langsung.
4. Tahun 2000 merupakan awal berlangsungnya proses pemulihan ekonomi Indonesia setelah dilanda oleh krisis ekonomi sejak dari tahun 1998.
5. Kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2000 sudah dianggap relatif stabil.
6. Tersedianya Tabel Input-Output (I-O) tahun 2000 secara nasional maupun regional melalui tabel I-O, keseimbangan antara "Supply" dan "Demand" atas berbagai produk barang dan jasa dapat dikontrol dengan baik.

BAB II

METODOLOGI

<http://bandungbaratkab.go.id>

BAB II

METODOLOGI

2.1 Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi serta beberapa penjelasan mengenai pengertian PDRB, PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan, Pendapatan Regional dan Pendapatan per Kapita serta lainnya, akan diuraikan secara singkat pengertian-pengertian umum di dalam PDRB sebagai berikut :

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar.

PDRB atas dasar harga pasar (harga yang berlaku) merupakan penjumlahan nilai tambah bruto (*gross value added*) dari seluruh sektor perekonomian di dalam suatu daerah/wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun. Yang dimaksud dengan nilai tambah adalah selisih nilai produksi (*output*) dengan biaya antara (*intermediate input*). Nilai Tambah Bruto (NTB) mencakup komponen faktor produksi; upah dan gaji, bunga, modal, sewa tanah, keuntungan, penyusutan, serta pajak tak langsung neto. Faktor pendapatan adalah merupakan balas jasa faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja (*labour*), modal (*capital*), tanah (*land*), managerial (*entrepreneur*).

2.1.2 Pendekatan Produksi

Merupakan jumlah nilai tambah bruto produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu daerah/wilayah dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

2.1.3 Pendekatan Pendapatan

Merupakan nilai balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

2.1.4 Pendekatan Pengeluaran

Merupakan jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumahtangga dan lembaga nirlaba/lembaga yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor) di dalam suatu daerah/wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.

2.1.5 Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar

PDRN atas dasar harga pasar merupakan PDRB yang dikurangi dengan penyusutan (*depreciation*). Penyusutan dikeluarkan dari PDRB oleh karena aus/susutnya barang modal selama berproduksi seperti mesin-mesin, peralatan, kendaraan, gedung dan barang modal lainnya.

2.1.6 Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor

PDRN atas dasar biaya faktor adalah PDRN dengan harga pasar dikurangi dengan pajak tak langsung ditambah subsidi dari pemerintah. Pajak tak langsung tersebut terdiri dari pajak penjualan, bea ekspor, cukai dan pajak tak langsung lainnya. Pajak tak langsung dibebankan kepada pembeli/konsumen, sehingga pengenaan pajak ini akan menaikkan harga barang. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk membantu para konsumen sehingga harga menjadi turun dan dapat dijangkau oleh daya beli (*purchasing power*) masyarakat. Subsidi tersebut terdiri dari subsidi pupuk, subsidi BBM dan subsidi lainnya. Selisih antara pajak tak langsung dengan subsidi disebut dengan pajak tak langsung neto.

2.1.7 Pendapatan Regional

Dari konsep/definisi di atas ternyata bahwa PDRN atas dasar biaya faktor merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi dalam proses produksi. Namun tidak seluruhnya menjadi milik suatu daerah/wilayah karena termasuk pendapatan penduduk wilayah lain. Sebaliknya PDRN tersebut harus pula ditambah dengan pendapatan yang diperoleh dari daerah lain. Bila PDRN dikurangi dengan pendapatan penduduk yang masuk (*income in flow*) dan yang keluar (*income out flow*) disebut dengan pendapatan neto antar daerah/wilayah, didapatkan pendapatan regional (produk regional neto). Oleh karena sulitnya memperoleh data pendapatan masuk dan

pendapatan keluar dalam suatu daerah/wilayah, maka PDRN atas dasar biaya faktor diasumsikan sama dengan pendapatan regional (produk regional neto) atau dengan kata lain pendapatan neto (pendapatan masuk dikurangi pendapatan keluar) sama dengan nol.

2.1.8 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Pendapatan per kapita tersebut diperoleh dengan membagi pendapatan regional/produk regional neto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (1). Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar (*gross regional domestic product at market prices*), bila dikurangi penyusutan akan diperoleh
- (2). Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar (*net regional domestic product at market prices*), bila dikurangi pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi) akan diperoleh
- (3). Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor (*net regional domestic product at factor cost*), bila ditambah dengan pendapatan neto (pendapatan masuk dikurangi pendapatan keluar) akan sama dengan
- (4). Pendapatan Regional (*regional income*), bila dikurangi dengan pajak pendapatan perusahaan (*corporate income taxes*), keuntungan yang tidak dibagikan (*undistributed profit*), iuran kesejahteraan sosial (*social security contribution*), ditambah dengan transfer yang

diterima rumahtangga, bunga neto atas hutang pemerintah, akan sama dengan

- (5). Pendapatan Perorangan (*personal income*), bila dikurangi pajak rumah tangga, transfer yang dibayarkan rumah tangga akan sama dengan
- (6). Pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*).

2.1.9 Produk Domestik dan Produk Regional

Di dalam literatur ekonomi terdapat perbedaan pengertian Produk Domestik dengan Produk Regional. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari kegiatan produksi yang dilakukan di suatu daerah/wilayah, beberapa faktor produksinya berasal dari daerah/wilayah lain, seperti tenaga kerja, mesin/alat bahkan modal untuk investasi. Dengan demikian menyebabkan nilai produksi di daerah/wilayah atau domestik tidak sama dengan pendapatan yang diterima oleh penduduk tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah (termasuk juga yang mengalir antar dari/ke luar negeri) pada umumnya terdiri dari upah/gaji, deviden dan keuntungan, akhirnya timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

Produk regional merupakan produk domestik setelah ditambah pendapatan yang mengalir ke dalam daerah/wilayah tersebut, kemudian dikurangi pendapatan yang mengalir ke luar daerah/wilayah. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk regional merupakan produk yang betul-betul dihasilkan oleh faktor-faktor

produksi (tenaga kerja, tanah, modal, entrepreneur) yang dimiliki penduduk daerah/wilayah yang bersangkutan. Namun karena masih terbatasnya data untuk memantau pendapatan yang mengalir dari/ke luar suatu daerah/wilayah, maka antara produk domestik dengan produk regional sampai saat ini diasumsikan sama.

2.1.10 Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa Pendapatan Regional menggambarkan perekonomian suatu daerah/wilayah. Perkembangan tersebut sebenarnya didasarkan atas beberapa faktor:

(1) Perubahan Harga

Perubahan harga yaitu kenaikan / penurunan perekonomian yang diakibatkan oleh perubahan harga yang terjadi di pasar. Pada umumnya harga tersebut cenderung menaik sehingga pendapatan regional atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun selalu menunjukkan kenaikan.

(2) Perubahan Riil

Perubahan riil yaitu kenaikan/penurunan perekonomian yang dihitung berdasarkan perubahan riil, artinya tidak termasuk lagi perubahan harga. Pengertian yang umum digunakan para ekonom yaitu pendapatan yang telah dihilangkan pengaruh inflasinya. Pendapatan regional atas dasar harga berlaku yang telah dikurangi dengan

perkembangan inflasi dikenal dengan pendapatan regional atas dasar harga konstan. Pendapatan regional yang terakhir inilah pada umumnya banyak dimanfaatkan oleh para birokrat, peneliti dan para ekonom.

2.2 Metode Penghitungan Pendapatan Regional

Dalam menyajikan statistik pendapatan regional terdapat 2 (dua) metode yang digunakan :

- a. Metode Langsung
- b. Metode Tidak Langsung.

2.2.1 Metode Langsung

Metode langsung adalah metode penghitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah/wilayah yang bersangkutan, tidak termasuk data yang diperoleh dari angka nasional atau daerah/wilayah lain. Pada prinsipnya metode langsung ini menggunakan tiga macam pendekatan :

- (1) Pendekatan Produksi
- (2) Pendekatan Pendapatan
- (3) Pendekatan Pengeluaran

(1) Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi dilakukan bila tersedia data produksi dari masing-masing sektor. Nilai tambah (value added) barang dan jasa yang diproduksi dihitung dengan cara mencari selisih nilai produksi (output) dengan biaya antara (*intermediate Cost*). Nilai tambah tersebut akan sama

dengan balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi. Pendekatan ini umumnya digunakan terhadap kegiatan-kegiatan produksi yang berbentuk barang/komoditi seperti sektor pertanian, pertambangan, penggalian dan industri.

(2) Pendekatan Pendapatan

Perkiraan nilai tambah dengan pendekatan pendapatan adalah dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor-faktor produksi (upah/gaji, surplus usaha) termasuk juga penyusutan dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Di dalam surplus usaha termasuk bunga modal neto (selisih bunga yang diterima dengan bunga yang dibayarkan) sewa tanah dan keuntungan (profit). Di dalam sektor-sektor yang tidak mencari untuk (non profit making) termasuk sektor pemerintahan, surplus usahanya tidak diperhitungkan, karena outputnya berupa pelayanan kepada masyarakat yang produksinya jasa (sektor pemerintahan). Hal tersebut dilakukan karena tidak tersedianya/kurang lengkapnya data produksi dan biaya antara.

(3) Pendekatan Pengeluaran

Perkiraan nilai tambah berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah dengan cara menghitung penggunaan akhir dari barang-barang dan jasa yang diproduksinya. Secara makro penggunaan akhir dari barang /jasa tersebut digunakan untuk :

- a. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga.
- b. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (Lembaga Nirlaba).

- c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.
- d. Pembentukan Modal Tetap Bruto.
- e. Perubahan Stok.
- f. Ekspor Neto (Ekspor-Impor).

2.2.2 Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung merupakan penghitungan dengan cara menggunakan data yang bersumber dari luar daerah/wilayah yang bersangkutan, seperti data nasional. Perkiraan dilakukan berdasarkan alokasi dengan mengalokasikan data tersebut ke daerah yang bersangkutan, yaitu menggunakan alokator yang cocok dengan sektor/kegiatan masing-masing. Metode tidak langsung ini sedapat mungkin dihindari, karena dalam praktek perhitungan PDRB, metode ini sangat jarang dilakukan oleh karena mengandung banyak kelemahan. Kecuali untuk daerah-daerah yang cakupan datanya tidak tersedia dengan lengkap seperti PDRB kecamatan.

2.3 Penyajian Angka Indeks

Agregat-agregat pendapatan yang diuraikan sebelumnya, disajikan dalam 2 (dua) bentuk:

1. Atas dasar harga berlaku (*at current price*)
2. Atas dasar harga konstan/tetap (*at constant price*).

Dari kedua penyajian tersebut, terdapat perbedaan antara lain :

- a. Penyajian atas dasar harga yang berlaku, menunjukkan agregat pendapatan dinilai menurut harga yang terjadi di pasar, baik

untuk menilai produksi maupun biaya antara. Termasuk juga penyajian PDRB menurut penggunaan (konsumsi rumahtangga, konsumsi lembaga nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok dan ekspor netto).

- b. Penyajian atas dasar harga konstan, yaitu agregat pendapatan yang dinilai menurut harga konstan/tetap. Baik produksi maupun biaya antara dinilai menurut harga tahun dasar, sehingga akan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan secara riil dari tahun ke tahun.

Disamping itu, agregat pendapatan, disajikan pula dalam bentuk angka indeks, antara lain : indeks perkembangan, indeks berantai dan indeks implisit. Secara rinci masing-masing indeks tersebut adalah sebagai berikut :

2.3.1 Indeks Perkembangan

Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan pendapatan / perekonomian dari tahun ke tahun yang dibandingkan dengan tahun dasar. Indeks tersebut diperoleh dengan membagi nilai agregat pendapatan masing-masing tahun dengan nilai tahun dasar dikalikan 100. Indeks perkembangan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$IP = \frac{PDRB_{it}}{PDRB_{io}} \times 100 \%$$

IP = Indeks Perkembangan

I = Sektor 1, ...Sektor 9

t = Tahun t

0 = Tahun dasar

2.3.2 Indeks Berantai

Indeks ini menunjukkan tingkat pertumbuhan agregat pendapatan atau yang lebih populer dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah/wilayah ditunjukkan oleh indeks berantai atas dasar harga konstan. Indeks tersebut diperoleh dengan membagi masing-masing agregat pendapatan dengan tahun sebelumnya dikalikan 100. Indeks berantai tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$IB = \frac{PDRB_{it}}{PDRB_{i(t-1)}} \times 100 \%$$

IB = Indeks Berantai

i = Sektor 1, ...Sektor 9

t = Tahun t

$t-1$ = Tahun sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi didapatkan dengan mengurangi indeks berantai dengan 100. Kalau indeks tersebut kurang dari 100 berarti pertumbuhannya negatif.

2.3.3 Indeks Implisit

Indeks ini merupakan indikator tingkat perkembangan harga dibandingkan harga pada tahun dasar. Bila dari data ini disusun indeks berantainya akan menunjukkan perkembangan harga dari tahun ke tahun secara makro. Indeks implisit ini diperoleh dengan cara membagi agregat harga berlaku dengan harga konstan pada tahun yang sama, dikalikan 100. Indeks implisit tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$IH = \frac{PDRB HB_{it}}{PDRB HK_{i0}} \times 100 \%$$

IH = Indeks Implisit

HB = Harga Berlaku

HK = Harga Konstan

2.4 Perkiraan Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Konstan

Perkiraan Pendapatan Regional atas dasar harga konstan ini sangat banyak kegunaannya terutama bagi para penentu kebijakan atau decision maker untuk memproyeksikan hasil pembangunan di masa datang. Bahkan bagi dunia usaha akan dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi produksi, distribusi dan termasuk marketing/pemasaran produk yang dihasilkan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai agregat harga konstan :

2.4.1 Revaluasi

Yang dimaksud dengan revaluasi adalah menilai produksi dan biaya produksi masing-masing tahun dengan harga yang terjadi pada tahun dasar (publikasi ini menggunakan harga tahun 2000). Dengan demikian akan dapat menggambarkan perkembangan kuantitas produksi dari tahun ke tahun. Dalam praktek sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara karena terdiri dari berbagai jenis input (komponen biaya) sehingga harus dinilai menurut harga masing-masing komponen. Pada umumnya biaya antara atas dasar harga konstan diperoleh dari perkalian antara output (nilai produksi) dengan ratio tetap biaya antara. Ratio tersebut didapat melalui survei khusus yang dilaksanakan di BPS Kabupaten Bandung Barat.

2.4.2 Ekstrapolasi

Ekstrapolasi dilakukan dengan mengalikan nilai tambah tahun dasar (2000) dengan indeks produksi masing-masing kegiatan/komoditi. Di samping indeks produksi sektor yang bersangkutan, dapat juga digunakan indeks yang mewakili atau diasumsikan sama dengan gerakan produksi, seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan, jumlah penduduk dan lain-lain. Metode ekstrapolasi dapat pula dilakukan terhadap output atas dasar harga konstan, yaitu mengalikan dengan ratio tetap nilai tambah. Ratio nilai tambah merupakan perbandingan nilai tambah dengan nilai output suatu komoditi/kegiatan/sektor, yang didapatkan dari Survei Khusus.

2.4.3 Deflasi

Metode deflasi digunakan untuk mendapatkan nilai tambah harga konstan, yaitu dengan membagi nilai tambah harga berlaku dengan indeks harga masing-masing tahun. Indeks harga yang dapat digunakan antara lain indeks harga komoditi yang bersangkutan atau indeks harga yang diasumsikan sejalan dengan perkembangan harga komoditi tersebut, seperti indeks harga konsumen (IHK), indeks perdagangan besar (IHPB) dan lain lain. Di samping itu, indeks harga dapat pula digunakan sebagai inflator untuk mendapatkan nilai tambah atas dasar harga yang berlaku, yaitu mengalikan nilai tambah harga konstan dengan indeks harga.

2.4.4 Deflasi Berganda (*Double Deflation*)

Untuk mendapatkan nilai tambah harga konstan dapat juga dilakukan dengan mendeflate nilai output dan biaya antara atas dasar harga yang berlaku. Selisih output dan biaya antara yang telah di deflate akan didapatkan nilai tambah atas dasar harga konstan. Dalam kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, hal ini disebabkan karena belum tersedianya data harga berbagai jenis input yang digunakan dalam berproduksi. Oleh sebab itu dalam estimasi nilai tambah atas dasar harga konstan, metode deflasi berganda belum digunakan.

BAB III
URAIAN SEKTORAL

<http://bandungbaratkabps.go.id>

BAB III

URAIAN SEKTORAL

Uraian sektoral yang disajikan pada bagian ini mencakup ruang lingkup dari masing-masing sektor kegiatan ekonomi dan cara-cara penghitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000. Secara makro perekonomian wilayah menurut lapangan usaha terdiri dari 3 (tiga) kelompok sektor utama yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih rinci, ketiga sektor tersebut dibagi lagi menjadi 9 sektor yaitu terdiri dari :

3.1 Pertanian

- 3.1.1 Tanaman Bahan Makanan
- 3.1.2 Tanaman Perkebunan
- 3.1.3 Kehutanan
- 3.1.4 Peternakan
- 3.1.5 Perikanan

3.2 Pertambangan dan Penggalian

- 3.2.1 Minyak dan Gas Bumi
- 3.2.2 Non Migas
- 3.2.3 Penggalian

3.3 Industri pengolahan

- 3.3.1 Industri Migas
 - 3.3.1.1 Pengilangan Minyak
 - 3.3.1.2 Gas Alam Cair
- 3.3.2 Industri Tanpa Migas

3.4 Listrik, Gas dan Air Minum

3.4.1 Listrik

3.4.2 Gas

3.4.3 Air Minum

3.5 Bangunan dan Konstruksi

3.6 Perdagangan, Hotel dan Restoran

3.6.1 Perdagangan Besar dan Eceran

3.6.2 Hotel

3.6.3 Restoran/Rumah Makan

3.7 Pengangkutan dan Komunikasi

3.7.1 Angkutan

3.7.1.1 Pengangkutan Kereta Api

3.7.1.2 Pengangkutan Darat

3.7.1.3 Pengangkutan Udara

3.7.1.4 Pengangkutan Laut

3.7.1.5 Pengangkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

3.7.1.6 Jasa Penunjang Angkutan

3.7.2 Komunikasi

3.7.2.1 Telkom dan Pos Giro

3.7.2.2 Jasa Penunjang Komunikasi

3.8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

3.8.1 Bank

3.8.2 Lembaga Keuangan Tanpa Bank

3.8.3 Jasa Penunjang Keuangan

3.8.4 Sewa Bangunan

3.8.5 Jasa Perusahaan

3.9 Jasa - Jasa

3.9.1 Pemerintahan Umum

3.9.2 Swasta

3.9.2.1 Jasa Sosial dan Kemasyarakatan

3.9.2.2 Jasa Hiburan dan Rekreasi

3.9.2.3 Jasa Perorangan dan Rumahtangga

3.1 PERTANIAN

Kegiatan sektor pertanian mencakup segala perusahaan dan pemanfaatan benda/barang biologis (hidup) yang didapat dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup atau usaha lainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain.

Kegiatan pertanian pada umumnya meliputi usaha bercocok tanam, pemeliharaan ternak, penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut, penebangan kayu dan pengambilan hasil hutan serta perburuan binatang liar. Sektor pertanian ini dirinci menjadi beberapa sub sektor yaitu :

3.1.1 Tanaman Bahan Makanan

Sub sektor ini meliputi kegiatan penyiapan dan pelaksanaan penanaman, pembibitan, pemeliharaan dan pemanenan hasil-hasil pertanian tanaman pangan seperti : padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, buah-buahan dan sayur-sayuran.

Metode Estimasi

Penghitungan nilai tambah sektor ini dilakukan melalui pendekatan produksi (*production approach*), yaitu mengalikan produksi dengan harga produsen masing-masing komoditi, sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 dilakukan melalui revaluasi.

Sumber Data :

1. BPS Propinsi Jawa Barat
2. Dinas Pertanian, Peternakan & Perikanan Kabupaten Bandung Barat.

3.1.2 Tanaman Perkebunan

Sub sektor Tanaman Perkebunan meliputi tanaman perkebunan rakyat dan tanaman perkebunan besar. Tanaman perkebunan rakyat adalah suatu usaha tanaman perkebunan yang dilakukan oleh rakyat secara individu dengan luas areal tanaman kurang dari 25 hektar. Tanaman perkebunan besar adalah suatu usaha tanaman perkebunan yang dilaksanakan oleh perusahaan atau oleh rakyat yang luas arealnya lebih besar atau sama dengan 25 hektar.

Metode Estimasi

Sub sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi (*production approach*), yaitu mengalikan produksi dengan harga produsen. Produksi bruto atas dasar harga konstan 2000 didapatkan dengan metode revaluasi.

Sumber Data :

1. BPS Propinsi Jawa Barat
2. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat.

3.1.3 Kehutanan

Sub sektor ini meliputi usaha di areal hutan berupa penebangan kayu, pengambilan getah, daun, akar dan kulit kayu, bambu, rotan, arang dan perburuan binatang hutan. Termasuk juga kayu dan bambu yang berasal dari areal non hutan seperti yang ditanam petani di kebun atau di pekarangan rumah.

Metode Estimasi

Sub sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi (*production approach*), yaitu mengalikan produksi dengan harga produsen. Produksi bruto atas dasar harga konstan 2000 didapatkan metode revaluasi.

Sumber Data :

1. BPS Propinsi Jawa Barat.
2. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat.

3.1.4 Peternakan dan Hasil-hasilnya

Sub sektor ini meliputi usaha pemeliharaan segala jenis ternak (besar dan kecil) dan unggas baik bertujuan untuk dikembangbiakkan, dipotong dan diambil dagingnya maupun untuk dimanfaatkan hasil-

hasilnya. Produksi ternak adalah jumlah ternak lahir ditambah dengan pertambahan berat badan atau penggemukkan dan hasil-hasil ternak lainnya seperti telur, bulu. Akan tetapi data pertambahan berat badan atau penggemukkan tersebut tidak bisa diperoleh, sehingga di dalam memperkirakan produksi ternak dilakukan dengan cara:

Jumlah pemotongan + Populasi akhir tahun - populasi awal tahun + ekspor - impor

Metode Estimasi

Sub sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi (*production approach*), yaitu mengalikan produksi dengan harga produsen. Produksi bruto atas dasar harga konstan 2000 didapatkan dengan metode revaluasi.

Sumber Data :

1. Dinas Peternakan & Perikanan Kabupaten Bandung Barat.

3.1.5 Perikanan

Sub sektor ini meliputi segala perusahaan perikanan yang mencakup usaha penangkapan, pengambilan maupun pemeliharaan segala jenis ikan dan hasil-hasilnya baik laut, di sungai maupun air tawar. Termasuk pengolahan sederhana seperti pengasinan atau pengeringan ikan yang dilakukan nelayan atau rumahtangga.

Metode Estimasi

Sub sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi (*production approach*), yaitu mengalikan produksi dengan harga produsen. Produksi bruto atas dasar harga konstan 2000 didapatkan dengan metode revaluasi.

Sumber Data :

1. Dinas Dinas Peternakan & Perikanan Kabupaten Bandung Barat.

3.2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Sektor ini meliputi usaha penggalian, pengeboran, pencucian, pengambilan dan pemanfaatan barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di dalam tanah, baik yang berupa benda padat, benda cair maupun gas. Sektor ini terdiri dari kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan non migas dan penggalian.

3.2.1 Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan ini meliputi penambangan minyak dan gas bumi baik yang dilakukan di darat maupun di laut.

3.1.1 Non Migas

Kegiatan ini meliputi penambangan komoditi non migas antara lain : emas, perak, nikel, mangan, timah, tembaga, bauxit dan mineral lainnya.

3.1.2 Penggalian

Kegiatan penggalian terdiri dari penggalian sumber daya alam lainnya antara lain : penggalian pasir, tanah liat, kapur, kaolin, batu dan komoditi lainnya.

Metode Estimasi

Sub sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi (*production approach*), yaitu mengalikan produksi dengan harga produsen. Produksi bruto atas dasar harga konstan 2000 didapatkan dengan metode revaluasi.

Sumber Data :

1. BPS Propinsi Jawa Barat

3.3 INDUSTRI DAN PENGOLAHAN

Sektor ini meliputi usaha kegiatan pengolahan bahan organik ataupun anorganik menjadi produk baru yang lebih tinggi mutunya, baik dilakukan dengan tangan, mesin, atau proses kimiawi. Pembuatan atau pengerjaannya dapat diproses melalui mesin/pabrik ataupun rumahtangga. Industri pengolahan dikelompokkan menjadi migas yang terdiri dari industri pengilangan minyak bumi dan gas alam cair.

Sedangkan industri tanpa migas meliputi industri pengolahan diluar migas, baik yang merupakan industri besar/ sedang, maupun

industri kecil dan rumahtangga. Industri ini dirinci menjadi 2 digit ISIC (*International Standard Industry Classification*).

1.3.1 Industri Migas

Kegiatan ini terdiri dari pengilangan minyak bumi dan gas alam cair.

1.3.1.1 Pengilangan Minyak Bumi

Kegiatan ini meliputi pengolahan minyak bumi yang menghasilkan produk-produk minyak avtur, premix, premium, solar, minyak tanah, aspal dan produk lainnya.

1.3.1.2 Gas Alam Cair

Kegiatan ini meliputi pengolahan pencairan gas alam (*Liquid Natural Gas*) yang produknya diekpor ke luar negeri.

1.3.2 Industri Tanpa Migas

Kegiatan ini meliputi pengolahan komoditi pertanian dan pertambangan di luar migas yang dikelompokkan dalam 2 digit ISIC.

Metode Estimasi

Sub sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi (*production approach*), yaitu mengalikan produksi dengan harga produsen. Produksi dengan harga produsen. Produksi bruto atas dasar harga konstan 2000 didapatkan dengan metode revaluasi.

Sumber Data :

1. BPS Propinsi Jawa Barat.
2. BPS Kabupaten Bandung Barat.

3.4 LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

Kegiatan sektor ini meliputi listrik, gas dan air bersih. Secara rinci sub sektor tersebut adalah :

3.4.1 Listrik

Sub sektor listrik meliputi pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian jaringan distribusi dan penyaluran listrik, untuk dijual kepada konsumen, baik oleh PLN maupun bukan PLN. Termasuk juga listrik yang dibangkitkan oleh sektor lain seperti : industri, jasa-jasa yang dijual kepada pihak lain dan datanya dapat dipisahkan.

Metode Estimasi :

Sub sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi (*production approach*), yaitu mengalikan produksi dengan harga produsen. Produksi bruto atas dasar harga konstan 2000 didapatkan dengan metode revaluasi.

Sumber Data :

1. PLN Cabang Cimahi
2. BPS Kabupaten Bandung Barat (Survei Khusus)

3.4.2 Air Bersih

Meliputi usaha penampungan dan penjernihan air bersih serta pendistribusiannya kepada konsumen, yang umumnya dilakukan oleh perusahaan air minum milik pemerintah daerah.

Metode estimasi

Sub sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi (*production approach*), yaitu mengalikan produksi dengan harga produsen. Produksi bruto atas dasar harga konstan 2000 didapatkan dengan metode ekstrapolasi.

Sumber Data :

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bandung Barat.

3.5 BANGUNAN DAN KONSTRUKSI

Sub sektor ini meliputi usaha pembangunan/pembuatan, perluasan, pemasangan, perbaikan berat dan ringan, perombakan bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, jalan, jembatan, bendungan, jaringan listrik, telekomunikasi dan konstruksi lainnya. Termasuk juga kegiatan sub konstruksi seperti : pemasangan instalasi listrik, saluran telepon, alat pendinginan, pembuatan saluran air dan sebagainya.

Metode Estimasi

Sektor ini estimasinya dilakukan melalui pendekatan produksi, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode deflasi.

Sumber Data :

1. BPS Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

3.6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

2.6.1 Perdagangan Besar dan Eceran

Sub sektor perdagangan besar meliputi kegiatan pembelian, pengumpulan dan penjualan kembali barang oleh pedagang dari pihak produsen atau importir kepada pedagang lain, perusahaan, lembaga atau konsumen tanpa merubah bentuk, baik yang baru maupun bekas dalam partai besar. Perdagangan eceran meliputi kegiatan pembelian, pengumpulan dan penjualan kembali yang pada umumnya melayani konsumen, perorangan atau rumahtangga tanpa merubah bentuk baik barang baru maupun bekas dalam partai kecil.

2.6.2 Hotel

Sub sektor ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi disini adalah hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen dan hotel.

2.6.3 Restoran

Sub sektor ini meliputi usaha restoran/rumah makan, katering, restoran di kereta api, cafetaria dan kantin. Termasuk usaha penjualan makanan dan minuman jadi yang biasanya dimakan langsung di tempat penjualan seperti : warung nasi, warung kopi, warung sate dan sejenisnya. Termasuk pula disini kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta fasilitas lainnya, sedangkan kegiatan-kegiatan tersebut berada dalam suatu satuan usaha dengan penginapan dan datanya sulit untuk dipisahkan.

Metode Estimasi

Untuk mengestimasi sub sektor perdagangan besar dan eceran dilakukan melalui pendekatan arus barang (*commodity flow*) baik untuk atas dasar harga berlaku maupun untuk atas dasar harga berlaku maupun untuk atas dasar harga konstan 2000, yaitu dengan menggunakan ratio margin terhadap nilai produksi daerah sendiri (pertanian, pertambangan dan penggalian serta industri) dan impor, termasuk barang keluar masuk antar daerah/propinsi. Nilai tambah harga berlaku dan harga konstan 2000, didapatkan dengan mengalikan output dengan ratio nilai tambah. Perkiraan output sub sektor restoran/rumah makan, hotel/penginapan dengan pendekatan produksi, sedangkan harga konstan 2000 diperoleh dengan cara ekstrapolasi.

Sumber Data :

1. Survei - survei Khusus
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Barat.

3.7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

3.1.3 Pengangkutan

Kegiatan sektor ini meliputi pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan alat angkutan baik yang bermotor maupun tidak bermotor atas dasar suatu pembayaran. Termasuk jasa angkutan yang sifatnya menunjang dan membantu memperlancar kegiatan tersebut beserta penyediaan fasilitas-fasilitasnya. Kegiatan pengangkutan ini dirinci sebagai berikut.

3.1.3.1 Pengangkutan Kereta Api

Meliputi semua kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan jasa kereta api termasuk gerbong.

3.1.3.2 Pengangkutan Darat

Meliputi semua kegiatan pengangkutan penumpang dan barang jalan raya yang menggunakan kendaraan seperti truk, bus, oplet, taksi, becak, pedati atau gerobak dan kendaraan darat lainnya.

3.1.3.3 Pengangkutan Udara

Meliputi semua kegiatan pengangkutan barang dan penumpang melalui udara dengan menggunakan pesawat udara/kapal terbang yang beroperasi di dalam maupun di luar negeri, baik penerbangannya yang dilakukan secara teratur maupun tidak.

3.1.3.4 Pengangkutan Laut

Meliputi angkutan samudra dan perairan pantai dengan menggunakan kapal laut, yang diusahakan oleh perusahaan pelayaran nasional baik yang beroperasi di dalam maupun di luar daerah ataupun di luar negeri. Termasuk juga kegiatan jasa penunjang angkutan laut seperti : pelabuhan laut/sungai, jasa pemanduan, bongkar muat, pergudangan, ekspedisi dan keagenan.

3.1.3.5 Pengangkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dari angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang menggunakan kapal, perahu, ferry dan angkutan air lainnya.

3.1.3.6 Jasa Penunjang Angkutan

Meliputi pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti : terminal, parkir, keagenan barang dan penumpang, bongkar muat, penyimpanan dan pergudangan serta jasa penunjang lainnya. Kegiatan tersebut terdiri dari :

- a. Terminal dan Perpakiran, mencakup kegiatan pelayanan dan pengaturan lalu lintas kendaraan/ armada yang membongkar dan mengisi muatan baik barang maupun penumpang seperti : terminal, parkir, pelabuhan laut meliputi fasilitas berlabuh, kapal pandu, penyediaan air tawar serta kegiatan pencacatan muatan barang dan penumpang.
- b. Bongkar Muat, kegiatan ini mencakup pemberian pelayanan bongkar/muat angkutan barang melalui laut dan darat yang terdiri dari pelabuhan laut, sungai dan pelabuhan udara
- c. Keagenan, kegiatan ini meliputi pelayanan keagenan barang dan penumpang yang diberikan kepada usaha angkutan, baik angkutan darat, laut, sungai dan udara.
- d. Pergudangan, kegiatan ini mencakup pemberian jasa penyimpanan barang dalam suatu bangunan/gudang ataupun lapangan terbuka dalam wilayah pelabuhan.

3.1.4 Komunikasi

3.1.4.1 Telkom dan Jasa Penunjang Telekomunikasi

Sub sektor ini meliputi kegiatan pelayanan jasa komunikasi untuk umum yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia dan PT Telkom. Kegiatan PT Pos Indonesia yaitu pemberian jasa kepada pihak lain seperti pengiriman surat, paket dan wesel. Kegiatan PT Telkom dengan menggunakan telepon, telex dan telegraph.

3.1.4.2 Jasa Penunjang Telekomunikasi

Kegiatan ini meliputi pemberian/penyediaan fasilitas yang menunjang kegiatan komunikasi seperti : wartel, warpostel, radio panggil dan telepon seluler (ponsel).

Metode Estimasi

Sub sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi untuk kegiatan pengangkutan dan metode alokasi untuk kegiatan komunikasi. Jasa penunjang telekomunikasi hanya mencakup wartel, sedangkan yang lain belum tersedia datanya.

Sumber Data:

1. BPS Propinsi Jawa Barat
2. PT Pos Indonesia, Cimahi
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat
4. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat

3.8 KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN

Sektor ini meliputi kegiatan perbankan, lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan.

3.1.5 Bank

Sub sektor ini meliputi pemberian jasa pelayanan di bidang keuangan kepada pihak keuangan kepada pihak lain seperti : menerima simpanan dalam bentuk giro dan tabungan, memberi pinjaman,

transfer/memindahkan rekening koran, membeli dan menjual surat berharga, memberi jaminan bank, menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga dan sebagainya.

3.1.6 Lembaga Keuangan Bukan Bank

Kegiatan lembaga keuangan bukan bank meliputi : asuransi, koperasi, pegadaian dan yayasan dana pensiun. Kegiatan asuransi meliputi pelayanan asuransi, baik asuransi jiwa maupun bukan jiwa seperti : kebakaran, kecelakaan, kerusakan dan sebagainya. Termasuk juga agen perasuransian, jasa pelayanan penanggung perasuransian unit pengatur dana pensiun yang berdiri sendiri dan sebagainya.

3.1.7 Jasa Penunjang Keuangan

Meliputi jasa pelayanan bidang keuangan seperti yang dilakukan pada usaha pasar modal, bursa valuta asing, penukaran mata uang asing (money changer), anjak piutang dan modal ventura.

Metode Estimasi

Sub sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi dan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan cara deflasi.

Sumber Data :

Survei Khusus Sektoral (BPS Kabupaten Bandung Barat)

3.1.8 Sewa Bangunan

Sektor ini meliputi semua jasa yang berhubungan dengan proses penggunaan rumah/bangunan sebagai tempat tinggal dan bukan tempat tinggal. Rumah tempat tinggal tanpa memperhatikan apakah rumah tersebut benar-benar disewa atau tidak seperti : rumah milik sendiri, rumah instansi pemerintah ataupun rumah instansi/perusahaan swasta lainnya.

Metode Estimasi

Untuk mengetahui besarnya peranan sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi dan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan cara deflasi.

Sumber Data : BPS Kabupaten Bandung Barat

3.1.9 Jasa Perusahaan

Sub sektor ini meliputi pemberian jasa pada pihak lain seperti : jasa hukum, jasa akuntan dan pembukuan, jasa pengolahan dan tabulasi, jasa bangunan, arsitek dan teknik, jasa periklanan, jasa persewaan mesin dan peralatan. Yang termasuk dalam penghitungan ini baru terbatas pada kegiatan jasa hukum (advokat, pengacara dan notaris) dan jasa konsultan.

Metode Estimasi

Dalam mengestimasi nilai tambah sub sektor jasa perusahaan yaitu dengan menggunakan, metode pendekatan produksi, sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 dengan metode ekstrapolasi. Untuk memperkirakan nilai tambah sub sektor ini datanya bersumber dari survei khusus. Ratio input diperoleh melalui hasil pengolahan survei khusus pada masing-masing jenis kegiatan.

Sumber Data : Survei Khusus (BPS Kabupaten Bandung Barat)

3.9 JASA - JASA

3.1.10 Pemerintahan Umum

Sektor ini mencakup kegiatan pemerintah umum dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat dinilai secara ekonomi misalnya dalam mengatur negara. Kegiatan pemerintah sebagian besar hasilnya digunakan oleh pemerintah sendiri sebagai konsumen akhir. Kegiatan pemerintah tersebut meliputi baik pemerintah pusat (badan/lembaga tinggi negara, departemen, lembaga non departemen dan unit-unit lainnya yang berada di pusat, dinas vertikal di daerah) maupun pemerintah daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) dan pemerintah desa serta unit-unitnya. Termasuk juga kegiatan pertahanan dan keamanan negara/daerah.

Metode Estimasi

Sektor ini dihitung berdasarkan pendekatan pendapatan untuk Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Pusat dan Pertahanan Keamanan dilakukan melalui cara tidak langsung yaitu alokasi dari angka nasional/propinsi. Penghitungan atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara ekstrapolasi yaitu menggunakan indeks jumlah pegawai secara tertimbang sebagai ekstrapolatornya.

Sumber Data :

1. BPS Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

3.1.11 Swasta

Kegiatan ini meliputi usaha penyelenggaraan pemberian jasa antara lain: jasa pendidikan dan jasa kesehatan, jasa hiburan dan rekreasi, jasa kemasyarakatan lainnya dan jasa perorangan dan rumahtangga.

3.1.11.1 Jasa Hiburan dan Rekreasi

Sub sektor ini meliputi usaha penyediaan dan pengelolaan berbagai jenis hiburan/rekreasi untuk masyarakat baik perorangan maupun rumahtangga, serta berorientasi untuk mencari untung (*profit making*). Kegiatan tersebut seperti pembuatan dan distribusi film, usaha pemutaran film, penyiaran radio dan televisi swasta, produksi dan

pertunjukkan film, produksi dan pertunjukkan sandiwara, tari, sanggar dan musik. Termasuk juga jasa rekreasi lainnya seperti gelanggang pacuan, sirkus, taman hiburan dan klub malam, penggubahan lagu, penulis buku, pembuat lukisan dan sebagainya. Dari berbagai kegiatan tersebut diatas hanya pemutaran film (bioskop), penyiaran radio swasta niaga dan taman hiburan/tempat rekreasi yang dapat diestimasi nilai tambahnya.

3.1.11.2 Jasa Perorangan dan Rumahtangga

Sub sektor ini meliputi kegiatan penyelenggaraan jasa yang diberikan untuk perorangan dan rumahtangga seperti reparasi, binatu, tukang jahit, tukang cukur, pembantu rumahtangga dan jasa perorangan lainnya. Mengingat keterbatasan data maka dalam penghitungan ini hanya terbatas pada kegiatan jasa reparasi, pembantu rumahtangga, tukang jahit, tukang cukur dan perawatan kulit, perawatan muka dan rambut.

Metode Estimasi

Besarnya output dari nilai tambah sektor ini dihitung dengan pendekatan produksi dan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 dengan menggunakan cara ekstrapolasi.

Sumber Data :

1. Dinas Depdikbud Kabupaten Bandung Barat
2. Kandep Agama Kabupaten Bandung Barat
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

BAB IV

KINERJA PEREKONOMIAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

<http://bandungbarat.kab.go.id>

BAB IV
KINERJA PEREKONOMIAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau total Nilai Tambah Bruto yang dihitung atas dasar harga berlaku Tahun 2013 di Kabupaten Bandung Barat mencapai Rp. 24.675.243,28 juta, atau mengalami peningkatan 13,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 21.721.238,05 juta. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 5,94 persen, yaitu dari Rp 9.016.250,41 juta di tahun 2011 naik menjadi Rp. 9.552.080,77 juta pada tahun 2013. Selama periode 2011 - 2013 PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan terus mengalami peningkatan dari sisi agregat (tabel 4.1.)

Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 - 2013 (juta Rp)

Tahun	PDRB Adh. Berlaku	PDRB Adh. Konstan
(1)	(2)	(3)
2011	19,354,913.12	8,502,534.79
2012*	21,721,238.05	9,016,250.41
2013**	24,675,243.28	9,552,080.71

Catatan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Secara umum pembentukan nilai tambah bruto tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sektor, yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Kelompok sektor primer terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan. Kelompok sektor sekunder terdiri dari sektor industri, sektor listrik/gas/air bersih dan sektor bangunan. Sedangkan kelompok sektor tersier terdiri dari sektor Perdagangan/Hotel/Restoran, sektor pengangkutan/telekomunikasi, sektor keuangan/persewaan/jasa perusahaan.

Pada tahun 2013 kelompok sektor sekunder masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Bandung Barat. Total nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang tercipta dari kelompok sektor ini mencapai Rp. 12.404.967,89 juta atau meningkat 12,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian diikuti oleh kelompok sektor tersier dan primer yang masing-masing menghasilkan nilai tambah Rp 9.222.678,99 juta dan Rp 3.047.596,40 juta atau masing-masing mengalami peningkatan 15,11 dan 14,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya (tabel 4.2).

PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, menurut kelompok sektor menggambarkan peningkatan kinerja sektor sekunder tahun 2013, yaitu sebesar 5,30 persen, dari sebesar Rp. 4.799.280,34 juta menjadi Rp. 5.053.855,22 juta. Pada kelompok sektor primer mengalami percepatan kinerja sebesar 5,07 persen, yaitu dari Rp. 1.053.526,28 juta ditahun 2012 menjadi Rp. 1.106.896,37 juta (tabel 4.3) Peningkatan kinerja yang cukup baik terjadi pada kelompok sektor tersier yang merupakan sektor-sektor pendukung dari seluruh kegiatan ekonomi,

dimana terjadi peningkatan sebesar 7,20 persen, dari Rp. 3.163.443,79 juta menjadi Rp. 3.391.329,18 juta.

Tabel 4.2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011–2013 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2011	2012 *	2013**
[1]	[2]	[3]	[4]
I. Primer	2,384,094.20	2,663,517.92	3,047,596.40
1. Pertanian	2,306,305.11	2,579,026.29	2,954,773.90
2. Pertambangan dan Penggalan	77,789.09	84,491.62	92,822.50
II. Sekunder	9,904,091.03	11,045,918.68	12,404,967.89
3. Industri	8,156,084.74	9,070,552.28	10,065,573.76
4. Listrik, Gas dan Air	1,235,950.27	1,362,523.67	1,621,822.70
5. Bangunan	512,056.02	612,842.73	717,571.42
III. Tersier	7,066,727.90	8,011,801.45	9,222,678.99
6. Perdagangan/Hotel/Restoran	3,956,799.54	4,608,653.64	5,340,855.49
7. Pengangkutan/telekomunikasi	1,262,796.76	1,331,880.45	1,532,399.51
8. Keuangan/Persewaan/jasa Perusahaan	533,566.18	595,488.08	676,661.98
9. Jasa-jasa	1,313,565.42	1,475,779.28	1,672,762.01
PDRB	19,354,913.12	21,721,238.05	24,675,243.28

Catatan : *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha atau sektoral terlihat pada tabel 4.2. Sektor industri yang merupakan *leading* perekonomian di Kabupaten Bandung Barat mampu membentuk nilai tambah bruto sebesar 10.065.573,76 juta rupiah. Keberadaan perusahaan industri besar dan sedang tersebar pada

beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, dan Kecamatan Padalarang merupakan wilayah yang memiliki jumlah perusahaan terbanyak, yaitu 66 perusahaan atau 43 persen dari jumlah perusahaan yang terdapat di Bandung Barat.

Tabel 4.3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2011 – 2013 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2011	2012 *	2013**
[1]	[2]	[3]	[4]
I. Primer	1,005,441.00	1,053,526.28	1,106,896.37
1. Pertanian	960,580.08	1,007,265.70	1,059,294.24
2. Pertambangan dan Pengalihan	44,860.92	46,260.58	47,602.14
II. Sekunder	4,552,195.10	4,799,280.34	5,053,855.22
3. Industri Pengolahan	3,728,282.35	3,908,716.94	4,097,613.06
4. Listrik, Gas dan Air	615,205.14	658,376.18	703,343.84
5. Bangunan	208,707.61	232,187.21	252,898.31
III. Tersier	2,944,898.69	3,163,443.79	3,391,329.18
6. Perdagangan/Hotel/Restoran	1,703,618.32	1,859,286.98	2,015,069.00
7. Pengangkutan/Telekomunikasi	469,307.10	491,064.95	514,516.04
8. Keuangan/Persewaan/Jasa Perusahaan	246,163.63	260,747.65	278,436.08
9. Jasa-jasa	525,809.64	552,344.22	583,308.06
PDRB	8,502,534.79	9,016,250.41	9,552,080.77

Pada posisi kedua, sektor perdagangan/hotel/restoran mampu membentuk nilai tambah bruto sebesar 5.340.885,49 juta rupiah. Perkembangan sarana perdagangan terlihat cukup signifikan pada periode tahun terakhir. Keberadaan pusat perbelanjaan dan beberapa

supermarket menjadi determinasi kinerja sektor ini. Namun pasar tradisional permanen diharapkan tetap mampu menjadi basis perdagangan tradisional, dengan penataan dan pengelolaan yang rapi.

Sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor yang sangat potensial dalam mendukung perekonomian Kabupaten Bandung Barat berada pada urutan ketiga dengan pembentukan nilai tambah sebesar 2.954.773,90 juta rupiah. Pendukung utama pada sektor ini adalah sub sektor tanaman bahan makanan yang terdiri dari tanaman pangan, tanaman sayuran dan buah-buahan. Selain itu sub sektor peternakan juga memiliki andil yang cukup signifikan dan mempunyai prospek ekonomi yang cukup tinggi untuk terus dikembangkan. Nilai agregat dari setiap sub sektor terdapat pada lampiran 1.

Atas dasar harga konstan (2000), sektor industri mampu membentuk nilai tambah bruto sebesar 4.097.613,06 juta rupiah dan sektor PHR sebesar 2.015.069.00 juta rupiah. Sedangkan nilai tambah sektor pertanian sebesar 1.059.294,24 juta rupiah.

4.2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian yang terbentuk pada suatu daerah menunjukkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tersedia dan sudah terkelola. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Indikator tersebut memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi

pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian struktur perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan tiap-tiap sektor dalam penciptaan nilai tambah. Struktur perekonomian juga akan memberikan gambaran secara umum tentang potensi ekonomi suatu wilayah.

Dengan mengelompokkan sektor menjadi tiga kelompok seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, maka akan terlihat fenomena umum dari struktur perekonomian suatu region bahwa semakin tinggi tingkat PDRB perkapita di suatu wilayah maka peranan sektor primer semakin menurun, tetapi sebaliknya peranan kelompok sektor sekunder dan kelompok sektor tersier akan semakin meningkat, atau dengan kata lain struktur ekonomi wilayah yang bersangkutan akan bergeser kearah kelompok sektor sekunder dan kelompok sektor tersier.

Pada tahun 2013 sektor sekunder masih mendominasi perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Struktur ekonomi Kabupaten Bandung Barat pada periode 2011-2013 tampak mengalami pergeseran, meskipun relatif sangat kecil. Selama periode tersebut sektor sekunder mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir dari 51,17 persen (2011) menjadi 50,27 persen (2013). Penurunan kontribusi kelompok sektor sekunder ini disebabkan adanya penurunan kontribusi sektor industri yang terjadi selama tiga tahun terakhir dari sebesar 42,14 persen (2011), 41,76 pada 2012 dan pada tahun 2013 ini menjadi sebesar 40,79 persen dari total pembentukan PDRB.

Pada periode 2011 – 2013 kontribusi kelompok sektor tersier terus mengalami kenaikan sebesar 0,87 poin dari 36,51 persen menjadi 37,38 persen dengan andil terbesar adalah sektor perdagangan/hotel/restoran (PHR) sebesar 21,64 persen pada tahun 2013. Dibandingkan dua tahun sebelumnya, sektor ini mampu meningkatkan kontribusinya sebesar 1,20 poin dari 20,44 persen. Sektor PHR menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir. Kabupaten Bandung Barat memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan tempat wisata alam yang representatif. Potensi tersebut mendorong kinerja sektor ini bergerak secara simultan untuk mendukung pengembangan obyek wisata yang ada.

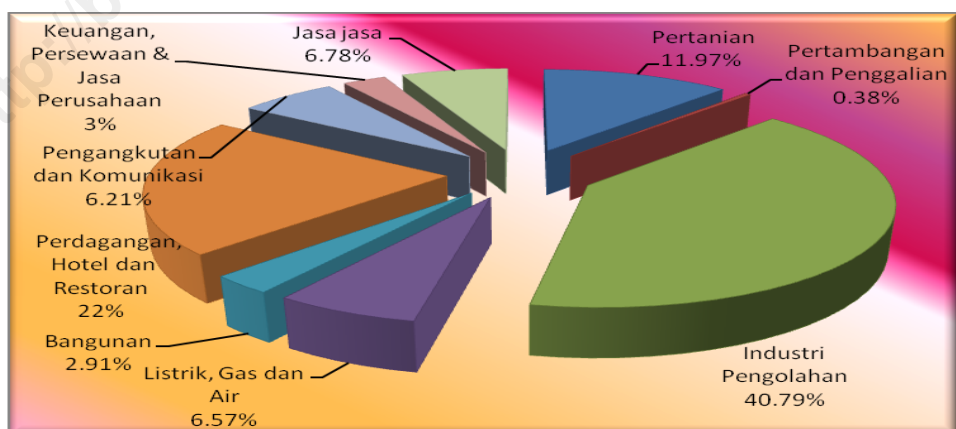
Tabel 4.4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2013 (Persen)

Lapangan Usaha	2011	2012 *	2013**
[1]	[3]	[4]	[5]
I. Primer	12.32	12.26	12.35
1. Pertanian	11.92	11.87	11.97
2. Pertambangan dan Penggalian	0.40	0.39	0.38
II. Sekunder	51.17	50.85	50.27
3. Industri	42.14	41.76	40.79
4. Listrik, Gas dan Air	6.39	6.27	6.57
5. Bangunan	2.65	2.82	2.91
III. Tersier	36.51	36.88	37.38
6. Perdagangan/Hotel/Restoran	20.44	21.22	21.64
7. Pengangkutan/Telekomunikasi	6.52	6.13	6.21
8. Keuangan/Persewaan/jasa Perusahaan	2.76	2.74	2.74
9. Jasa-jasa	6.79	6.79	6.78
PDRB	100.00	100.00	100.00

Kelompok sektor primer merupakan kelompok sektor dengan andil terkecil, yaitu sebesar 12,35 persen yang disumbangkan oleh sektor pertanian. Pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 0,10 poin dari tahun sebelumnya yaitu dari 11,87 persen menjadi 11,97 persen (tabel 4.4).

Pendukung utama pada sektor ini adalah sub sektor tanaman bahan makanan yang terdiri dari tanaman pangan, tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman pangan masih memegang kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB sub sektor tanaman bahan makanan. Jumlah dan luas sawah yang tersebar, terutama wilayah Kabupaten Bandung Barat bagian selatan menjadi faktor pendukung dalam produksi padi dan palawija. Selain itu, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi yang sangat bagus dalam pengembangan tanaman hortikultura. Peluang investasi pada komoditi hortikultura terbuka cukup lebar, karena potensi alam dan pasar cukup mendukung.

Grafik 4.1. Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013



Selain itu sub sektor peternakan juga memiliki andil yang cukup signifikan dan mempunyai prospek ekonomi yang cukup tinggi untuk terus dikembangkan.

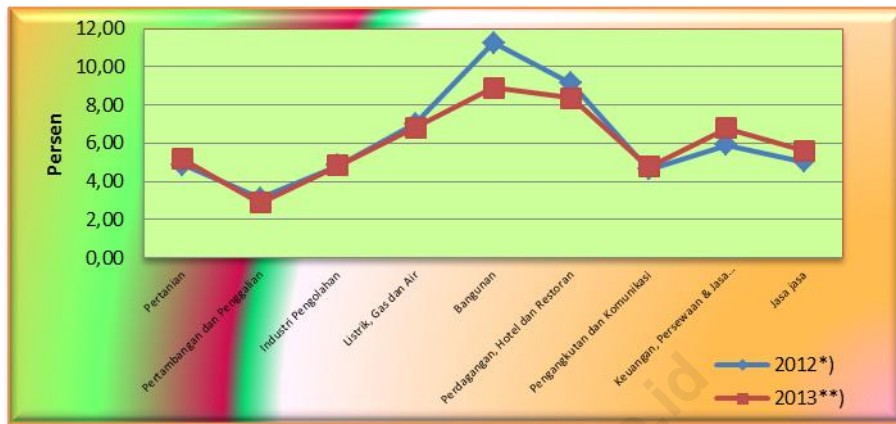
Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut didalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan.

Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa perekonomian Kabupaten Bandung Barat masih didominasi oleh sektor industri dengan andil sebesar 40,79 persen. Diikuti oleh sektor perdagangan/hotel/restoran (PHR) dan sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 21,64, persen dan 11,87 persen.

4.3. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2013 secara riil ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atas dasar harga konstan tahun 2000, yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,94 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terjadi perlambatan sebesar 0,1 poin dimana tahun 2012 mencapai 6,04 persen

Gambar 4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 - 2013 (Persen)



Catatan *) = Angka Perbaikan
 **) = Angka Sementara

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2013 lebih baik dari pada pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Barat. Sebagai kabupaten yang masih berusia belia, Kabupaten Bandung Barat masih harus bekerja keras dalam melakukan akselerasi pembangunan wilayahnya. Secara umum LPE sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Pertumbuhan ekonomi ini digerakkan oleh pertumbuhan yang positif pada semua kelompok sektor. Kelompok sektor primer mengalami pertumbuhan sebesar 5,07 persen, sekunder sebesar 5,30 persen dan tersier 7,20 persen. Kelompok sektor primer merupakan kelompok sektor yang memiliki pertumbuhan terkecil pada tahun ini. Seperti halnya tahun sebelumnya sub sektor ini mengalami percepatan, hal ini di sebabkan oleh percepatan sektor pertanian yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah kelompok tersebut.

Tabel 4.5. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011 – 2013 (Persen)

Lapangan Usaha	2011	2012 *	2013**
[1]	[3]	[4]	[5]
I. Primer	2.39	4.78	5.07
1. Pertanian	2.14	4.86	5.17
2. Pertambangan dan Penggalian	8.12	3.12	2.90
II. Sekunder	5.99	5.43	5.30
3. Industri	5.68	4.84	4.83
4. Listrik, Gas dan Air	6.04	7.02	6.83
5. Bangunan	11.66	11.25	8.92
III. Tersier	6.57	7.42	7.20
6. Perdagangan/Hotel/ Restoran	7.57	9.14	8.38
7. Pengangkutan/ Telekomunikasi	4.00	4.64	4.78
8. Keuangan/Persewaan/jasa Perusahaan	6.35	5.92	6.78
9. Jasa-jasa	5.80	5.05	5.61
PDRB	5.75	6.04	5.94

Tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor cukup bervariasi (Tabel 4.5 dan Tabel Lampiran 6). Dengan variasi tersebut dapat kita bagi 3 (tiga) kelompok yaitu :

Kelompok pertama; LPE dibawah 4 persen ditunjukkan oleh sektor pertambangan/penggalian. Kelompok kedua; LPE berkisar 4 sampai 8 persen ditunjukkan oleh sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik/gas dan air, sektor pengangkutan/komunikasi, sektor keuangan/persewaan/jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Sektor industri pengolahan juga mengalami pertumbuhan yang relatif stabil, yaitu mencapai 4,83 persen. Sebagai sektor yang

dominan dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Bandung Barat, pertumbuhan sektor ini menjadi pendorong (*engine growth*) bagi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bandung Barat.

Kelompok ketiga : LPE diatas 8 persen, ditunjukkan oleh sektor PHR dan sektor bangunan masing-masing dengan laju pertumbuhan sebesar 8,38 persen dan 8,92 persen. (Tabel 4.5 dan Tabel Lampiran 6). Kenaikan sektor PHR didorong oleh meningkatnya aktivitas pada sub sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh sebesar 8,64 persen. Faktor peningkatan sarana perdagangan dan ketersediaan fasilitas kredit konsumsi merupakan determinasi kinerja sektor ini.

Pembangunan perumahan maupun fasilitas umum di Kabupaten Bandung Barat secara kasat mata cukup terlihat. Kabupaten Bandung Barat sebagai kabupaten yang relatif baru menjadi wilayah potensi sehingga merangsang investor ataupun pengembang, melakukan pembangunan perumahan maupun fasilitas umum lainnya. Selain itu kegiatan persiapan lahan dan pembangunan Perkantoran Pemerintahan Daerah masih terus dilaksanakan. Kondisi ini menjadikan sektor konstruksi memperlihatkan pertumbuhan yang cukup signifikan.

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat secara umum cukup menunjukkan perkembangan yang relatif baik, meski masih banyak potensi ekonomi yang belum dikembangkan secara optimal. Apabila dicermati pertumbuhan sektor *non-tradable* (yang tidak dapat diperdagangkan) seperti sektor perdagangan/hotel/restoran, sektor keuangan, jasa menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Namun sektor *tradable* (pertanian, pertambangan dan penggalian serta industri

pengolahan) menunjukkan laju pertumbuhan yang relatif rendah atau dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi secara total. Ketimpangan pertumbuhan sektor *tradable* dan *non tradable* ini memiliki implikasi yang serius terkait dengan surplus ekonomi dan pemerataan. Sektor *non tradable* bersifat padat modal, teknologi dan pengetahuan. Sebaliknya sektor *non tradable* bersifat padat karya, sehingga sektor ini jika mampu tumbuh lebih baik akan memberi dampak yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Meski secara kontribusi, peranan sektor industri masih memegang peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013, yaitu sebesar lebih dari 40 persen. Sebagai konsekuensinya arah dan gerak pembangunan daerah harus tetap fokus dan terarah, pembangunan tidak hanya semata-mata mengejar laju pertumbuhan ekonomi saja, namun aspek pemerataan menjadi salah satu target pembangunan yang penting.

Diakui, bahwa pembangunan belum sepenuhnya bergerak seirama di setiap wilayah Bandung Barat. Beberapa kecamatan yang dekat dengan ibukota kabupaten seperti Kecamatan Lembang, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar memperlihatkan gerakan ekonomi yang cukup signifikan. Namun untuk kecamatan di wilayah selatan Bandung Barat masih perlu kerja keras untuk mendorong pergerakan perekonomiannya. Muara dari pembangunan tersebut tentunya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

4.4. PDRB Perkapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *Percapita Income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) serta transfer masuk (*transfer in*) yang merupakan komponen penghitungan pendapatan regional, belum dapat dihitung maka dalam penghitungan pendapatan per kapita menggunakan PDRB perkapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Jumlah penduduk pertengahan tahun yang digunakan pada tahun 2013 ini adalah hasil proyeksi penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (SP2010) (sumber : BPS RI).

Tabel 4.6. PDRB Per Kapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 - 2013 (Persen)

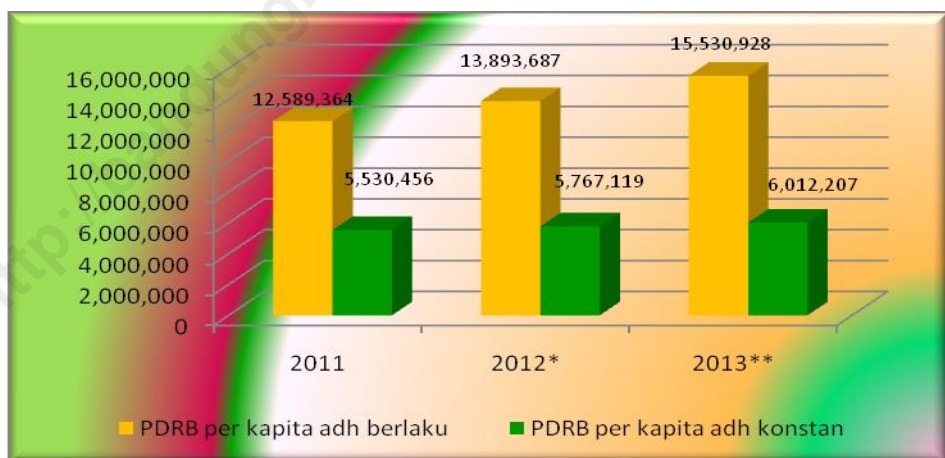
Uraian	2011	2012 *	2013**
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rp)	19,354,913.12	21,721,238.05	24,675,243.28
2. PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Juta Rp)	8,502,534.79	9,016,250.41	9,552,080.77
3. Jumlah penduduk pertengahan tahun (jiwa)	1,537,402	1,563,389	1,588,781
4. PDRB per kapita adh berlaku (Rp)	12,589,363.82	13,893,687.40	15,530,927.97
5. PDRB per kapita adh konstan (Rp)	5,530,456.44	5,767,119.01	6,012,207.33
6. LPE PDRB per kapita adh berlaku (%)	8.38	10.36	11,78
7. LPE PDRB per kapita adh konstan (%)	3.88	4.28	4.25

*) Angka perbaikan. **) Angka Sementara

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal. PDRB per kapita atas dasar berlaku selama kurun waktu 2011-2013 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. PDRB per kapita/tahun atas dasar berlaku Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 sebesar Rp. 12.589.364,- Tahun 2012 dan 2013 meningkat menjadi dan Rp. 13.893.687,- dan Rp. 15.530.928,-.

Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai 11,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB per kapita atas dasar berlaku tidak menggambarkan peningkatan secara riil, tetapi lebih disebabkan adanya pengaruh kenaikan harga atau tingkat inflasi yang terjadi di wilayah tersebut

Gambar 4.3. PDRB Per Kapita Per Tahun Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2013 (Rupiah)



Catatan *) = Angka Perbaikan **) = Angka Sementara

Sedangkan PDRB perkapita atas dasar konstan 2000 yang menggambarkan nilai tambah riil penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp. 5,530,456,- dan Rp. 5,767,119,- . PDRB per kapita tahun 2013 mencapai 6.012.207,- rupiah atau tumbuh sebesar 4,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

4.5 Tingkat Inflasi

Secara makro, inflasi dalam konteks ini adalah menunjukkan perubahan indeks implisit di Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2013 inflasi mencapai 7,23 persen, lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 5,83 persen. Kenaikan tingkat inflasi merupakan imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak pada tahun 2013 ini.

LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BANDUNG BARAT
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011-2013 (Juta Rupiah)**

LAPANGAN USAHA	2011	2012*	2013**
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PERTANIAN	2,306,305.11	2,579,026.29	2,954,773.90
a. Tanaman Bahan Makanan	1,159,387.75	1,309,539.97	1,512,886.56
b. Tanaman Perkebunan	345,000.83	389,239.56	441,134.59
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	597,464.12	654,132.05	745,498.18
d. Kehutanan	17,924.60	19,212.66	20,964.95
e. Perikanan	186,527.81	206,902.06	234,289.62
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	77,789.09	84,491.62	92,822.50
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-
c. Penggalian	77,789.09	84,491.62	92,822.50
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	8,156,084.74	9,070,552.28	10,065,573.76
a. Industri Migas	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	8,156,084.74	9,070,552.28	10,065,573.76
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1,235,950.27	1,362,523.67	1,621,822.70
a. Listrik	1,226,909.72	1,352,298.64	1,610,134.66
b. Gas	-	-	-
c. Air Bersih	9,040.55	10,225.03	11,688.04
5. BANGUNAN	512,056.02	612,842.73	717,571.42
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	3,956,799.54	4,608,653.64	5,340,855.49
a. Perdagangan Besar & Eceran	2,928,246.07	3,428,909.62	4,018,710.60
b. Hotel	47,311.73	51,916.64	58,228.21
c. Restoran	981,241.74	1,127,827.39	1,263,916.68
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	1,262,796.76	1,331,880.45	1,532,399.51
a. Pengangkutan	1,090,485.16	1,145,186.98	1,329,650.41
1. Angkutan Rel	6,902.05	7,385.26	8,451.83
2. Angkutan Jalan Raya	989,045.32	1,037,795.84	1,209,032.16
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyeberangan.	817.17	834.42	912.14
5. Angkutan Udara	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	93,720.62	99,171.46	111,254.28
b. Komunikasi	172,311.60	186,693.46	202,749.10
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	533,566.18	595,488.08	676,661.98
a. bank	72045.64	83,157.74	98,023.32
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	14865.70	17,082.08	20,047.86
c. Sewa Bangunan	372,942.13	411,832.25	463,302.02
d. Jasa Perusahaan	73712.71	83,416.02	95,288.77
9. JASA-JASA	1,313,565.42	1,475,779.28	1,672,762.01
a. Pemerintahan Umum	568,602.83	629,456.02	692,420.42
b. Swasta	744,962.59	846,323.25	980,341.59
1. Sosial Kemasyarakatan	91,838.60	104,260.16	119,805.69
2. Hiburan & Rekreasi	12,138.80	14,055.83	16,421.18
3. Perorangan & Rumah tangga	640,985.19	728,007.27	844,114.73
PDRB DENGAN MIGAS	19,354,913.12	21,721,238.05	24,675,243.28
PDRB TANPA MIGAS	19,354,913.12	21,721,238.05	24,675,243.28

Catatan : *) = Angka Perbaikan **) = Angka Sementara

**LAMPIRAN 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BANDUNG BARAT
ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011-2013 (Juta Rupiah)**

LAPANGAN USAHA	2011	2012*	2013**
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PERTANIAN	960,580.08	1,007,265.70	1,059,294.24
a. Tanaman Bahan Makanan	550,750.21	576,745.62	607,774.53
b. Tanaman Perkebunan	141,538.11	149,435.94	158,043.45
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	161,932.42	169,284.16	175,581.53
d. Kehutanan	8,122.69	8,229.10	8,378.87
e. Perikanan	98,236.64	103,570.89	109,515.86
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	44,860.92	46,260.58	47,602.14
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-
c. Penggalian	44,860.92	46,260.58	47,602.14
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	3,908,716.94	3,728,282.35	4,097,613.06
a. Industri Migas	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	3,908,716.94	3,728,282.35	4,097,613.06
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	615,205.14	658,376.18	703,343.84
a. Listrik	609,927.41	652,744.32	697,326.75
b. Gas	-	-	-
c. Air Bersih	5,277.73	5,631.87	6,017.09
5. BANGUNAN	208,707.61	232,187.21	252,898.31
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	1,703,618.32	1,859,286.98	2,015,069.00
a. Perdagangan Besar & Eceran	1,201,378.09	1,316,229.83	1,429,952.09
b. Hotel	21,247.70	22,142.23	23,362.26
c. Restoran	480,992.53	520,914.92	561,754.64
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	469,307.10	491,064.95	514,516.04
a. Pengangkutan	408,429.92	425,798.52	443,910.82
1. Angkutan Rel	3,555.48	3,757.44	3,972.36
2. Angkutan Jalan Raya	362,431.40	377,689.76	393,552.73
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyeberangan.	306.15	309.85	313.94
5. Angkutan Udara	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	42,136.89	44,041.48	46,071.79
b. Komunikasi	60,877.18	65,266.43	70,605.22
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	246,163.63	260,747.65	278,436.08
a. Bank	40,885.52	44,655.17	48,906.34
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	5,734.93	6,228.71	6,780.57
c. Sewa Bangunan	167,492.98	175,582.89	186,065.19
d. Jasa Perusahaan	32,050.20	34,280.89	36,683.98
9. JASA-JASA	525,809.64	552,344.22	583,308.06
a. Pemerintahan Umum	213,706.34	216,527.27	220,013.36
b. Swasta	312,103.30	335,816.95	363,294.70
1. Sosial Kemasyarakatan	43,060.21	46,918.41	51,178.60
2. Hiburan & Rekreasi	5,113.04	5,569.64	6,064.22
3. Perorangan & Rumah tangga	263,930.04	283,328.90	306,051.88
PDRB DENGAN MIGAS	8,502,534.79	9,016,250.41	9,552,080.77
PDRB TANPA MIGAS	8,502,534.79	9,016,250.41	9,552,080.77

Catatan : *) = Angka Perbaikan **) = Angka Sementara

**LAMPIRAN 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BANDUNG BARAT
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011-2013 (Persen)**

LAPANGAN USAHA	2011	2012*	2013**
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PERTANIAN	11.92	11.87	11.97
a. Tanaman Bahan Makanan	5.99	6.03	6.13
b. Tanaman Perkebunan	1.78	1.79	1.79
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	3.09	3.01	3.02
d. Kehutanan	0.09	0.09	0.08
e. Perikanan	0.96	0.95	0.95
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0.40	0.39	0.38
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-
c. Penggalian	0.40	0.39	0.38
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	42.14	41.76	40.79
a. Industri Migas	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	42.14	41.76	40.79
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	6.39	6.27	6.57
a. Listrik	6.34	6.23	6.53
b. Gas	-	-	-
c. Air Bersih	0.05	0.05	0.05
5. BANGUNAN	2.65	2.82	2.91
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	20.44	21.22	21.64
a. Perdagangan Besar & Eceran	15.13	15.79	16.29
b. Hotel	0.24	0.24	0.24
c. Restoran	5.07	5.19	5.12
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	6.52	6.13	6.21
a. Pengangkutan	5.63	5.27	5.39
1. Angkutan Rel	0.04	0.03	0.03
2. Angkutan Jalan Raya	5.11	4.78	4.90
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyeberangan.	0.00	0.00	0.00
5. Angkutan Udara	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	0.48	0.46	0.45
b. Komunikasi	0.89	0.86	0.82
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	2.76	2.74	2.74
a. Bank	0.37	0.38	0.40
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0.08	0.08	0.08
c. Sewa Bangunan	1.93	1.90	1.88
d. Jasa Perusahaan	0.38	0.38	0.39
9. JASA-JASA	6.79	6.79	6.78
a. Pemerintahan Umum	2.94	2.90	2.81
b. Swasta	3.85	3.90	3.97
1. Sosial Masyarakat	0.47	0.48	0.49
2. Hiburan & Rekreasi	0.06	0.06	0.07
3. Perorangan & Rumah tangga	3.31	3.35	3.42
PDRB DENGAN MIGAS	100.00	100.00	100.00
PDRB TANPA MIGAS	100.00	100.00	100.00

Catatan : *) = Angka Perbaikan **) = Angka Sementara

LAMPIRAN 4. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BANDUNG BARAT ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011-2013 (Persen)			
LAPANGAN USAHA	2011	2012*	2013**
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PERTANIAN	11.30	11.17	11.09
a. Tanaman Bahan Makanan	6.48	6.40	6.36
b. Tanaman Perkebunan	1.66	1.66	1.65
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1.90	1.88	1.84
d. Kehutanan	0.10	0.09	0.09
e. Perikanan	1.16	1.15	1.15
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0.53	0.51	0.50
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-
c. Penggalian	0.53	0.51	0.50
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	43.85	43.35	42.90
a. Industri Migas	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	43.85	43.35	42.90
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	7.24	7.30	7.36
a. Listrik	7.17	7.24	7.30
b. Gas	-	-	-
c. Air Bersih	0.06	0.06	0.06
5. BANGUNAN	2.45	2.58	2.65
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	20.04	20.62	21.10
a. Perdagangan Besar & Eceran	14.13	14.60	14.97
b. Hotel	0.25	0.25	0.24
c. Restoran	5.66	5.78	5.88
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	5.52	5.45	5.39
a. Pengangkutan	4.80	4.72	4.65
1. Angkutan Rel	0.04	0.04	0.04
2. Angkutan Jalan Raya	4.26	4.19	4.12
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyeberangan.	0.00	0.00	0.00
5. Angkutan Udara	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	0.50	0.49	0.48
b. Komunikasi	0.72	0.72	0.74
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	2.90	2.89	2.91
a. Bank	0.48	0.50	0.51
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0.07	0.07	0.07
c. Sewa Bangunan	1.97	1.95	1.95
d. Jasa Perusahaan	0.38	0.38	0.38
9. JASA-JASA	6.18	6.13	6.11
a. Pemerintahan Umum	2.51	2.40	2.30
b. Swasta	3.67	3.72	3.80
1. Sosial Kemasyarakatan	0.51	0.52	0.54
2. Hiburan & Rekreasi	0.06	0.06	0.06
3. Perorangan & Rumah tangga	3.10	3.14	3.20
PDRB DENGAN MIGAS	100.00	100.00	100.00
PDRB TANPA MIGAS	100.00	100.00	100.00

Catatan : *) = Angka Perbaikan **) = Angka Sementara

**LAMPIRAN 5. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BANDUNG BARAT
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011-2013 (Persen)**

LAPANGAN USAHA	2011	2012*	2013**
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PERTANIAN	6.89	11.83	14.57
a. Tanaman Bahan Makanan	5.63	12.95	15.53
b. Tanaman Perkebunan	12.26	12.82	13.33
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	4.75	9.48	13.97
d. Kehutanan	5.34	7.19	9.12
e. Perikanan	12.78	10.92	13.24
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	11.81	8.62	9.86
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-
c. Penggalian	11.81	8.62	9.86
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	9.74	11.21	10.97
a. Industri Migas	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	9.74	11.21	10.97
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	9.20	10.24	19.03
a. Listrik	9.18	10.22	19.07
b. Gas	-	-	-
c. Air Bersih	11.40	13.10	14.31
5. BANGUNAN	17.20	19.68	17.09
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	12.54	16.47	15.89
a. Perdagangan Besar & Eceran	12.41	17.10	17.20
b. Hotel	3.10	9.73	12.16
c. Restoran	13.42	14.94	12.07
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	8.28	5.47	15.06
a. Pengangkutan	7.95	5.02	16.11
1. Angkutan Rel	8.83	7.00	14.44
2. Angkutan Jalan Raya	7.97	4.93	16.50
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyeberangan.	8.56	2.11	9.31
5. Angkutan Udara	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	7.66	5.82	12.18
b. Komunikasi	10.40	8.35	8.60
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	11.77	11.61	13.63
a. Bank	15.23	15.42	17.88
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	11.68	14.91	17.36
c. Sewa Bangunan	11.41	10.43	12.50
d. Jasa Perusahaan	10.37	13.16	14.23
9. JASA-JASA	13.64	12.35	13.35
a. Pemerintahan Umum	11.46	10.70	10.00
b. Swasta	15.36	13.61	15.84
1. Sosial Masyarakat	18.20	13.53	14.91
2. Hiburan & Rekreasi	13.20	15.79	16.83
3. Perorangan & Rumah tangga	15.00	13.58	15.95
PDRB DENGAN MIGAS	10.32	12.23	13.60
PDRB TANPA MIGAS	10.32	12.23	13.60

Catatan : *) = Angka Perbaikan **) = Angka Sementara

**LAMPIRAN 6. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BANDUNG BARAT
ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011-2013 (Persen)**

LAPANGAN USAHA	2011	2012*	2013**
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PERTANIAN	2.14	4.86	5.17
a. Tanaman Bahan Makanan	1.03	4.72	5.38
b. Tanaman Perkebunan	5.41	5.58	5.76
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1.20	4.54	3.72
d. Kehutanan	(0.20)	1.31	1.82
e. Perikanan	5.78	5.43	5.74
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	8.12	3.12	2.90
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-
c. Penggalian	8.12	3.12	2.90
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	5.68	4.84	4.83
a. Industri Migas	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	5.68	4.84	4.83
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	6.04	7.02	6.83
a. Listrik	6.04	7.02	6.83
b. Gas	-	-	-
c. Air Bersih	6.84	6.71	6.84
5. BANGUNAN	11.66	11.25	8.92
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	7.57	9.14	8.38
a. Perdagangan Besar & Eceran	7.24	9.56	8.64
b. Hotel	1.20	4.21	5.51
c. Restoran	8.70	8.30	7.84
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	4.00	4.64	4.78
a. Pengangkutan	3.60	4.25	4.25
1. Angkutan Rel	5.40	5.68	5.72
2. Angkutan Jalan Raya	3.52	4.21	4.20
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyeberangan.	3.41	1.21	1.32
5. Angkutan Udara	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	4.21	4.52	4.61
b. Komunikasi	6.77	7.21	8.18
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	6.35	5.92	6.78
a. Bank	9.52	9.22	9.52
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	6.58	8.61	8.86
c. Sewa Bangunan	5.43	4.83	5.97
d. Jasa Perusahaan	7.23	6.96	7.01
9. JASA-JASA	5.80	5.05	5.61
a. Pemerintahan Umum	1.20	1.32	1.61
b. Swasta	9.19	7.60	8.18
1. Sosial Masyarakat	9.80	8.96	9.08
2. Hiburan & Rekreasi	8.80	8.93	8.88
3. Perorangan & Rumah tangga	9.10	7.35	8.02
PDRB DENGAN MIGAS	5.75	6.04	5.94
PDRB TANPA MIGAS	5.75	6.04	5.94

Catatan : *) = Angka Perbaikan **) = Angka Sementara

**LAMPIRAN 7. INDEKS IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BANDUNG BARAT
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011-2013**

LAPANGAN USAHA	2011	2012*	2013**
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PERTANIAN	240.10	256.04	278.94
a. Tanaman Bahan Makanan	210.51	227.06	248.92
b. Tanaman Perkebunan	243.75	260.47	279.12
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	368.96	386.41	424.59
d. Kehutanan	220.67	233.47	250.21
e. Perikanan	189.88	199.77	213.93
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	173.40	182.64	195.00
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-
b. Pertambangan Tanpa Migas	-	-	-
c. Penggalian	173.40	182.64	195.00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	218.76	232.06	245.64
a. Industri Migas	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	218.76	232.06	245.64
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	200.90	206.95	230.59
a. Listrik	201.16	207.17	230.90
b. Gas	-	-	-
c. Air Bersih	171.30	181.56	194.25
5. BANGUNAN	245.35	263.94	283.74
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	232.26	247.87	265.05
a. Perdagangan Besar & Eceran	243.74	260.51	281.04
b. Hotel	222.67	234.47	249.24
c. Restoran	204.00	216.51	224.99
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	269.08	271.22	297.83
a. Pengangkutan	266.99	268.95	299.53
1. Angkutan Rel	194.12	196.55	212.77
2. Angkutan Jalan Raya	272.89	274.77	307.21
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyeberangan.	266.92	269.30	290.55
5. Angkutan Udara	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	222.42	225.18	241.48
b. Komunikasi	283.05	286.05	287.16
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	216.75	228.38	243.02
a. Bank	176.21	186.22	200.43
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	259.21	274.25	295.67
c. Sewa Bangunan	222.66	234.55	249.00
d. Jasa Perusahaan	229.99	243.33	259.76
9. JASA-JASA	249.82	267.18	286.77
a. Pemerintahan Umum	266.07	290.71	314.72
b. Swasta	238.69	252.02	269.85
1. Sosial Kemasyarakatan	213.28	222.22	234.09
2. Hiburan & Rekreasi	237.41	252.37	270.79
3. Perorangan & Rumahtangga	242.86	256.95	275.81
PDRB DENGAN MIGAS	227.64	240.91	258.32
PDRB TANPA MIGAS	227.64	240.91	258.32

Catatan : *) = Angka Perbaikan **) = Angka Sementara

**LAMPIRAN 8. INFLASI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BANDUNG BARAT
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2011-2013 (Persen)**

LAPANGAN USAHA	2011	2012*	2013**
[1]	[2]	[3]	[4]
1. PERTANIAN	4.65	6.64	8.94
a. Tanaman Bahan Makanan	4.56	7.86	9.63
b. Tanaman Perkebunan	6.50	6.86	7.16
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	3.51	4.73	9.88
d. Kehutanan	5.55	5.80	7.17
e. Perikanan	6.62	5.21	7.09
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	3.41	5.33	6.76
a. Minyak dan Gas Bumi			
b. Pertambangan Tanpa Migas			
c. Penggalian	3.41	5.33	6.76
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	3.84	6.08	5.85
a. Industri Migas	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	3.84	6.08	5.85
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	2.97	3.01	11.42
a. Listrik	2.96	2.99	11.45
b. Gas	-	-	-
c. Air Bersih	4.27	5.99	6.99
5. BANGUNAN	4.96	7.58	7.50
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	4.62	6.72	6.93
a. Perdagangan Besar & Eceran	4.82	6.88	7.88
b. Hotel	1.88	5.30	6.30
c. Restoran	4.34	6.13	3.92
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	4.11	0.80	9.81
a. Pengangkutan	4.20	0.73	11.37
1. Angkutan Rel	3.26	1.25	8.25
2. Angkutan Jalan Raya	4.30	0.69	11.80
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyeberangan.	4.98	0.89	7.89
5. Angkutan Udara	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	3.31	1.24	7.24
b. Komunikasi	3.40	1.06	0.39
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	5.10	5.36	6.41
a. Bank	5.21	5.68	7.63
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	4.78	5.80	7.81
c. Sewa Bangunan	5.67	5.34	6.16
d. Jasa Perusahaan	2.93	5.80	6.75
9. JASA-JASA	7.41	6.95	7.33
a. Pemerintahan Umum	10.14	9.26	8.26
b. Swasta	5.64	5.58	7.07
1. Sosial Masyarakat	7.65	4.19	5.35
2. Hiburan & Rekreasi	4.05	6.30	7.30
3. Perorangan & Rumah tangga	5.40	5.80	7.34
PDRB DENGAN MIGAS	4.33	5.83	7.23
PDRB TANPA MIGAS	4.33	5.83	7.23

Catatan : *) = Angka Perbaikan **) = Angka Sementara

**LAMPIRAN 9. ANGKA AGREGATIF PDRB, JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN DAN PDRB PER KAPITA
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011-2013**

URAIAN	2011	2012*	2013**
[1]	[2]	[3]	[4]
1. NILAI ABSOLUT			
a. PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rp)	19,354,913.12	21,721,238.05	24,675,243.28
b. PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Juta Rp)	8,502,534.79	9,016,250.41	9,552,080.77
c. Jumlah penduduk pertengahan tahun (Jiwa)	1,537,402	1,563,389	1,588,247
d. PDRB per kapita adh Berlaku (Rp)	12,589,363.82	13,893,687.40	15,536,149.78
e. PDRB per kapita adh konstan 2000 (Rp)	5,530,456.44	5,767,119.01	6,014,228.75
	8.378338421	10.36052014	11.82164485
2. INDEKS BERANTAI			
a. PDRB atas dasar harga berlaku	122.13	123.81	127.49
b. PDRB atas dasar harga konstan 2000	111.54	112.14	112.34
c. Jumlah penduduk pertengahan tahun	103.51	103.52	103.31
d. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku	117.98	119.61	123.41
e. PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000	107.75	108.33	108.75
3. INDEKS HARGA IMPLISIT PDRB	227.64	240.91	258.32

Catatan : *) = Angka Perbaikan **) = Angka Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://bandungbarat.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Jl. Raya Cimareme No 199, Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Telp.: (022) 6620715 ; Fax.: (022) 6620715; e-mail: bps3217@bps.go.id